



PENGUATAN KEMITRAAN KOMPREHENSIF INDONESIA-AMERIKA SERIKAT

Lisbet*)

Abstrak

Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS disahkan pada tanggal 9 November 2010 oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari arti penting Indonesia bagi AS dan kepentingan nasional Indonesia terhadap AS, Presiden Joko Widodo mengupayakan penguatan kerja sama kemitraan ini, terutama bidang maritim. Pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama ini harus berdasarkan kesetaraan dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan DPR RI kiranya sangat diperlukan agar kerjasama ini bermanfaat besar bagi Indonesia.

Pendahuluan

Kerja sama Kemitraan Komprehensif merupakan kesepakatan yang dilaksanakan oleh dua negara sebagai suatu perwujudan komitmen jangka panjang untuk memperluas, memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral. Inisiatif membentuk kerja sama kemitraan ini datang dari Indonesia di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara USINDO Luncheon, 14 November 2008 di Washington. Saat itu, pemerintah menganggap bahwa kerja sama yang telah terjalin dengan Amerika Serikat perlu lebih dioptimalkan agar lebih menguntungkan masyarakat kedua negara. Presiden SBY menekankan bahwa kerja

sama ini dibangun berdasarkan kesetaraan dan kepentingan bersama, serta yang tidak kalah pentingnya bukan suatu aliansi.

Dalam lawatan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta, 9 November 2010, kerja sama Kemitraan Komprehensif kedua negara disahkan. Isi *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the United States of America* menekankan bahwa kedua negara membutuhkan kemitraan ini untuk mengatasi tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks, seperti isu perubahan iklim, energi baru dan terbarukan (EBT), serta *Millenium Development Goals*

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: lisbet.sihombing@dpr.go.id



(MDGs).

Rencana aksi kemitraan ini mencakup tiga pilar, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial-budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pilar politik-keamanan, kedua negara akan memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dan keamanan. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk menjalin kerja sama keamanan dan pertahanan untuk mengatasi ancaman non-tradisional di kawasan.

Sementara itu, pada pilar ekonomi dan pembangunan, kedua negara akan memperluas kerja sama perdagangan dan melakukan pengurangan terhadap hambatan-hambatan perdagangan. Pilar ini diarahkan untuk memperluas kerja sama pembangunan, melakukan kolaborasi pengembangan kebijakan energi dan pengembangan EBT, serta upaya untuk mengatasi tantangan iklim dan lingkungan. Pada pilar sosial-budaya, kerja sama kedua negara ini mencakup perluasan kerja sama pendidikan melalui pertukaran akademis, peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, dan peningkatan kerja sama iptek dan penelitian. Kedua negara juga sepakat untuk melakukan kerja sama terkait perdamaian melalui dialog, toleransi dan penghargaan perbedaan.

Arti Penting Indonesia Bagi AS

Kerja sama kemitraan AS-Indonesia tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia merupakan negara majemuk yang menjadi contoh nyata keberhasilan dalam mengimplementasikan sistem demokrasi dengan tingginya toleransi antar-umat beragama. Oleh karena itu, AS membutuhkan dukungan Indonesia dalam upayanya mempromosikan demokrasi, perdamaian dunia, supremasi hukum, dan toleransi beragama ke seluruh dunia.

Di bidang ekonomi, dengan populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang penting bagi AS. Sebagaimana diketahui, saat ini, produk-produk Tiongkok telah mendominasi pasar di Asia termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, agar dapat memenangkan pasar Indonesia yang sangat potensial, AS harus dapat menjalin hubungan perdagangan yang menguntungkan dengan Indonesia.

Harapan AS tentunya bahwa pasar Indonesia yang sebagian diambil Tiongkok akan dapat diambil oleh atau beralih ke produk AS.

Dalam hal pertahanan, AS membutuhkan Indonesia untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan Asia. Dengan demikian, kerja sama kemitraan ini akan semakin memperjelas posisi Indonesia dalam persaingan kedua negara di Asia. Secara geografis, dengan posisinya yang terletak diantara dua samudra dan dua benua yang strategis, Kemitraan Komprehensif dengan Indonesia akan sangat mendukung kepentingan militer AS.

Selain itu, AS juga mewaspadai gagasan Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang Jalur Sutra Laut yang bersinergi dengan gagasan Presiden Jokowi tentang Poros Maritim Dunia. Kebijakan Jalur Sutra Laut Tiongkok ini nantinya akan menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara, pesisir Samudra Hindia, di sekitar Laut Merah dan akhirnya sampai ke Eropa. Melalui gagasan ini, kolaborasi Tiongkok dengan Indonesia akan semakin mempercepat dan memperkuat kebijakan Tiongkok tersebut. Posisi Tiongkok di bidang perdagangan internasional dan militer akan semakin kuat. Oleh karena itu, gagasan penguatan kerja sama tersebut perlu diantisipasi oleh AS secara cepat.

Kedudukan penting Indonesia di mata AS juga bisa dilihat dalam konteks kuatnya pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara, terutama terhadap negara-negara ASEAN. AS membutuhkan Indonesia untuk menghadapi semakin agresifnya Tiongkok dalam masalah Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan Spratly yang diklaim Tiongkok dan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. AS menilai semakin agresifnya Tiongkok seperti dibarengi dengan peningkatan kapasitas militernya akan sangat membahayakan perdamaian di Asia Tenggara. Dalam perspektif ini, dukungan dalam upaya menjaga perdamaian kawasan Asia Tenggara sangat dibutuhkan AS.

Arti Penting AS Bagi Indonesia

AS memiliki arti penting bagi Indonesia. Di bidang ekonomi, investasi AS di Indonesia pada tahun 2004-2012 telah

mencapai US\$65 miliar. Di tahun 2013, AS juga tercatat sebagai investor asing terbesar ketiga di Indonesia dengan total investasi sebesar US\$ 2,4 miliar. Besarnya nilai investasi AS ini telah membantu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Di bidang pendidikan, arti penting AS bagi Indonesia diantaranya mencakup kepentingan Indonesia dalam mengakses (*sharing*) teknologi dan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di samping itu, keuntungan lain bagi Indonesia mencakup peningkatan kerja sama pendidikan dan riset. Sebagai contoh, melalui peningkatan kerja sama ini, mahasiswa Indonesia semakin mudah mengikuti program “*twinning*” dengan menyelesaikan program studinya selama 2 tahun di Indonesia dan 2 tahun di AS.

Di bidang pertahanan, Indonesia pun mendapatkan keuntungan di bidang militer. Sejak tahun 2010, sudah lebih dari 25 kali diadakan latihan bersama antara TNI dan Militer AS. Disamping itu, lebih dari 110 perwira TNI telah belajar di AS. AS juga telah memberikan 24 pesawat F-16 tanpa dipungut biaya (melalui fasilitas *Excess Defense Articles*). Selain itu, Kongres AS juga telah menyetujui penjualan helikopter Apache kepada pemerintah Indonesia.

Penguatan Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS

Menyadari arti penting Indonesia bagi AS dan kepentingan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menghendaki adanya penguatan kerja sama kemitraan ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dilaksanakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada tanggal 10 November 2013 di Beijing. Kedua negara memiliki kepentingan yang sama terhadap kemaritiman sehingga sepakat untuk melakukan penguatan terhadap salah satu bidang yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi ini.

Pada periode sebelumnya, kedua negara sudah menjalin kerja sama di bidang kelautan berdasarkan MoU antara Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2007. Sebagai rujukan implementatifnya, MoU ini juga dilengkapi dengan perjanjian baru berupa *Implementing Arrangement MoU* yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2010. Namun demikian, Indonesia melihat bahwa kerja sama kelautan ini belum optimal karena ruang lingkupnya yang masih terbatas khususnya jika dilihat dalam konteks kemaritiman. Apalagi, kerja sama bidang kelautan/kemaritiman sebelumnya pun belum menjadi prioritas dalam ketiga pilar Kemitraan Komprehensif tersebut.

Salah satu bentuk dukungan nyata AS terhadap bidang maritim Indonesia adalah memberikan bantuan dana dengan nilai total sebesar US\$ 68 juta, dimana sebesar US\$ 35 juta telah diberikan untuk program kemaritiman Indonesia dan US\$ 33 juta akan diberikan untuk program yang sama meskipun lebih ditekankan pada program pengawasan penangkapan ikan secara ilegal. AS juga menyatakan dukungannya terhadap konservasi untuk tuna sirip kuning yang 40 persen jumlahnya hidup diperairan Indonesia dan konservasi terumbu karang. Selain itu, Badan Atmosfer dan Kelautan AS (*National Oceanic and Atmospheric Administration/NOAA*) pun akan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam penyediaan satelit baru yang dapat mendeteksi cahaya lampu perahu nelayan khususnya kapal nelayan asing yang melintas pada malam hari dalam *illegal fishing*. Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di bidang kemaritiman, AS juga akan membantu pendidikan vokasi bagi para pelajar sekolah tinggi perikanan Indonesia yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan tiga universitas AS, yakni *University of Rhode Island*, *University of Mississippi*, dan *University of Oregon*.

Walaupun dalam kemitraan ini kedudukan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) adalah setara (*equal partnership*), namun faktanya, posisi Indonesia masih berada di bawah AS. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan Kemitraan Komprehensif ini. Kendala-kendala ini perlu segera diatasi oleh

pemerintah agar Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dari kemitraan ini.

Kendala yang paling besar adalah pengimplementasian program-program yang terdapat dalam Kemitraan Komprehensif. Meskipun sudah terdapat rencana aksi dan penentuan prioritas terhadap kemitraan komprehensif ini, namun pada saat pengimplementasian, program-program tersebut tidak berjalan optimal karena kurangnya sinergi antar lembaga terkait. Kendala lainnya adalah terbatasnya teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Akibat keterbatasan teknologi, Indonesia tidak dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti yang terdapat pada bidang kemaritiman.

Penutup

Indonesia perlu memperkuat kerja sama Kemitraan Komprehensif ini karena Indonesia membutuhkan dukungan AS dalam bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan maritim. Dengan adanya dukungan AS tersebut, masyarakat Indonesia akan memperoleh manfaat sebagaimana yang menjadi tujuan awal dari pembentukan kemitraan tersebut.

Guna memperkuat Kemitraan Komprehensif ini, diperlukan peranan DPR RI terutama dalam fungsi pengawasan agar kerja sama ini membawa manfaat besar bagi Indonesia. Pada waktu pelaksanaan rapat kerja dengan mitra kerja, terutama kementerian maupun lembaga yang terkait, DPR RI dapat meminta laporan pertanggungjawaban terhadap program kerja yang telah dilakukan dalam rangka menguatkan Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat.

Selain itu, pengawasan DPR juga diperlukan agar tidak terjadi kecurangan dalam penelitian dan pengembangan yang menggunakan sumber daya alam Indonesia guna memproteksi sumber daya alam Indonesia tersebut. Hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian Indonesia di masa depan.

Bentuk dukungan lainnya yang dapat dilakukan oleh DPR RI adalah dengan meningkatkan hubungan baik yang telah terjalin selama ini dengan Kongres AS. Kerja sama parlemen kedua negara telah dirintis sejak tahun 2008. Ketua DPR RI saat itu, Agung Laksono, dan *Chairman US*

House of Representatives, Congressmen David Price telah menandatangani *Mutual of Understanding* yang isinya adalah kerja sama untuk meningkatkan SDM dan kualitas staf Parlemen di kedua negara. Dengan adanya MoU ini diharapkan hubungan baik diantara DPR RI dan Kongres AS akan menjadi semakin erat sehingga pelaksanaan Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat pun akan semakin optimal.

Rujukan

- Lisbet. 2011. "Peluang Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif", *Jurnal Politica*, Vol. 2. No. 1,181-183.
- Lisbet. "Peningkatan kekuatan Militer China", *Info Singkat*, Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/2012, 5-8.
- "AS Siap Bantu Pemberantasan Pencurian Ikan di Indonesia", *Kompas*, 21 Januari 2015, hal. 17.
- "Indonesia-AS Kerja sama Pendidikan Kelautan", *Republika*, 21 Januari 2015, hal. 5.
- "Surat Terbuka DPD Masyarakat 2014", <http://www.kemlu.go.id/chicago/Documents/Surat-Terbuka-DPD-Masyarakat-2014-.pdf> diakses tanggal 22 Januari 2015.
- "Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the United States of America", <http://www.kemlu.go.id/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=17&l=id>, diakses tanggal 27 Januari 2015.
- Speech by Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President Republic of Indonesia, "Indonesia and America: A 21st Century Partnership", <http://usindo.org/wp-content/uploads/2010/07/SBY-Speech-at-USINDO-Nov-20081.pdf> diakses tanggal 27 Januari 2015.
- Johanes Herlijanto, "Antara Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Laut", <http://ir.binus.ac.id/2014/12/29/antara-poros-maritim-dunia-dan-jalur-sutra-laut/> diakses tanggal 28 Januari 2015.